

PRAKTEK KESETARAAN GENDER DALAM PENDIDIKAN PADA PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) DI LAMPUNG

Zainal Abidin¹⁾ Tobibatussa'adah¹⁾ Abdul Mujib¹⁾

Institut Agama Islam Negeri Metro

Email: zainal.abidin@metrouniv.ac.id

Email: tobibahsaadah@metrouniv.ac.id

Email: abdulmujib@metrouniv.ac.id

Abstrak

Masalah kesetaraan gender dalam berbagai bidang menjadi isu krusial di beberapa negara, begitu juga di Indonesia. Salah satu masalah gender adalah adanya kesenjangan dalam partisipasi pendidikan antara laki-laki dan perempuan. Hal ini menjadi salah satu perhatian di kalangan para aktifis gender, dan melahirkan berbagai gerakan gender yang memperjuangkan nasib perempuan yang dianggap mengalami marginalisasi dalam konteks kehidupan sosial, politik, budaya, ekonomi dan tentunya pendidikan. Salah satu gerakan persamaan derajat dalam bidang pendidikan adalah semangat pendidikan untuk semua (*Education for All*). Semangat tersebut mulai direspon oleh pemerintah dengan lahirnya kebijakan gender mainstream atau Pengarusutamaan Gender (PUG) tahun 2000. Bersamaan dengan itu dalam konteks pendidikan non formal lahir lembaga pendidikan yang berbasis pada masyarakat yaitu Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang menyelenggarakan pendidikan kesetaraan, dan memberikan peluang yang lebar untuk partisipasi perempuan dalam bidang pendidikan dan mensejajarkannya dengan laki-laki. Hasil penelitian tentang praktek kesetaraan gender dalam pendidikan pada PKBM di Lampung yaitu PKBM Al-Suroya, PKBM Roona dan PKBM Permata menunjukkan bahwa program-program pendidikan telah dilaksanakan secara inklusif sehingga tidak ada bias gender baik dari aspek kurikulum, proses belajar mengajar, hingga evaluasi dilakukan dengan menerapkan prinsip-prinsip pembelajaran yang responsif gender.

Kosa Kata: Kesetaraan Gender, Pendidikan dan PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat)

Abstract

The issue of gender equality in various fields has become a crucial issue in several countries, as well as in Indonesia. One of the gender problems is the gap in educational participation between men and women. This has become a concern among gender activists, and has spawned various gender movements that fight for the fate of women who are considered marginalized in the context of social, political, cultural, economic and educational life. One of the equality movements in the field of education is the spirit of education for all (*Education for All*). The government began to respond to this spirit with the birth of a mainstream gender policy or Gender Mainstreaming (PUG) in 2000. Simultaneously, in the context of non-formal education, a community-based educational institution was born, namely the Community Learning Activity Center (PKBM) which

provides equality education, and provides wide opportunities for women's participation in education and on an equal footing with men. The results of research on the practice of gender equality in education at PKBM in Lampung, namely PKBM Al-Suroya, PKBM Roona and PKBM Permata show that educational programs have been implemented in an inclusive manner so that there is no gender bias in terms of curriculum, teaching and learning processes, and evaluations are carried out. by applying the principles of gender responsive learning.

Keywords: *Gender Equality, Education and PKBM (Center for Community Learning Activities)*

A. Pendahuluan

Permasalahan kesetaraan pendidikan berbasis gender masih menjadi topik yang menarik di dunia hingga saat ini, bahkan bisa dianggap sebagai trending topik kajian-kajian dalam berbagai forum, terutama bagi aktifis gender dunia. Hal ini tidak terlepas dari kondisi faktual masih adanya disparitas kesempatan pendidikan yang tajam berdasarkan kacamata gerakan feminisme, antara kaum laki-laki dan perempuan. Gerakan gender itu sendiri berangkat dari aktifis-aktifis feminisme dunia yang berjuang dalam hal penyeteraan derajat laki-laki dan perempuan dalam semua bidang kehidupan, sosial, politik, ekonomi, budaya dan pendidikan.

Perbedaan kesempatan dalam bidang pendidikan antara laki-laki dan perempuan tidak hanya terjadi lembaga-lembaga formal tetapi juga di lembaga pendidikan non formal baik yang dikelola oleh negara maupun pihak swasta, di sekolah-sekolah, lembaga-lembaga kursus, lembaga pelatihan dan sebagainya. Fenomena ini juga tidak hanya terjadi di negara-negara berkembang, tetapi juga terjadi di negara-negara maju, termasuk di Indonesia. Oleh karena itu program pendidikan yang berbasis pada kesetaraan gender menjadi prioritas pendidikan nasional sehingga akses pendidikan bisa dinikmati oleh semua warga negara (*education for all*). Lembaga pendidikan baik formal maupun nonformal, dianggap bagus jika program pembelajarannya mempunyai nilai sensitifitas gender, yakni kepedulian kesamaan derajat antara laki-laki dan perempuan.

Sebagai salah satu lembaga pendidikan non-formal Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) merupakan lembaga pendidikan yang didirikan untuk membantu peningkatan kualitas pendidikan bagi masyarakat yang mempunyai tugas mendidik dan melatih penduduk Indonesia di bidang pendidikan. Kemunculan lembaga pendidikan tersebut didasarkan pada beberapa regulasi pendidikan yang ada di Indonesia, terutama regulasi pendidikan yang lahir pada era reformasi. Pada era sebelumnya program yang senada dengan PKBM sesungguhnya sudah ada melalui program pendidikan non-formal yang di selenggarakan oleh pemerintah melalui program kelompok belajar (kejar) dalam bentuk kelompok belajar paket A, B dan C, atau lebih dikenal dengan Kejar Paket. Namun setelah reformasi berlangsung, sejumlah perubahan pun terjadi termasuk dalam penyelenggaraan pembelajaran di masyarakat, di mana untuk melaksanakan kegiatan tersebut diberikan wewenang sepenuhnya kepada masyarakat atau swasta untuk menyelenggarakan kegiatan. Kegiatan atau program itu berorientasi membantu masyarakat supaya bisa mendapatkan ijazah atau pendidikan penyeteraan, dalam rangka mendukung program wajib belajar

(wajar) yang telah dikembangkan oleh pemerintah. Di samping itu PKBM juga menjadi wadah untuk memberikan sejumlah pelatihan keterampilan praktis (*life skills*) yang berguna untuk menjalani aktifitas kehidupannya, siap berkarya dalam berbagai pekerjaan yang dibutuhkan masyarakat.

Sebagai lembaga pendidikan non formal dan sekaligus lembaga non-pemerintah PKBM dituntut untuk mampu berkiprah dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan mewujudkan semangat pendidikan untuk semua. Hal ini senada dengan lembaga-lembaga pendidikan formal lainnya. Namun demikian banyak ditemukan kendala-kendala di lapangan terutama berkaitan dengan akses pendidikan yang belum merata, khususnya dalam perimbangan pendidikan bagi peserta didik laki-laki dan perempuan, misalnya yang masih terlihat belum seimbang bukan hanya dalam perspektif peserta didiknya tetapi juga dalam konteks pendidiknya.

Beberapa data dan fakta tentang masalah kesetaraan gender dalam dunia pendidikan akhir-akhir ini menjadi fenomena yang krusial di dunia bukan hanya di Indonesia, termasuk bidang-bidang strategis lainnya. Berdasarkan data yang dirilis UNDP menunjukkan bahwa indeks kesetaraan gender Indonesia berada dalam posisi 103 dari 162 negara atau menempati posisi terendah ke-3 di kasawan negara-negara ASEAN. Dalam situasi pandemi Covid 19 kondisi ketimpangan gender itu semakin meningkat terutama dalam sektor pendidikan, dan beban sebagai pencari nafkah hingga masalah ekonomi lainnya bahkan ancaman kekerasan dalam rumah tangga.¹

Menurut hasil penelitian Puslitbang Wanita, Anak dan Pembangunan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Lampung (UNILA), bekerjasama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung. Laporan tersebut dibukukan dalam sebuah buku hasil penelitian dengan judul "Profil Gender Provinsi Lampung tahun 2019", menunjukkan hasil bahwa masih terdapat kesenjangan gender dalam pendidikan yang tersebar di beberapa kabupaten dan kota yang ada di Propinsi Lampung. Kesenjangan kesempatan memperoleh pendidikan tersebar dalam berbagai jenjang pendidikan, dari jenjang SD, SMP, dan SMA/SMK.² Berdasarkan data-data tersebut, maka tulisan ini akan menganalisis beberapa pertanyaan utama sesuai dengan topik yaitu bagaimanakah praktek kesetaraan gender dalam pendidikan pada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) di Lampung dan apa kendala yang dihadapi PKBM dalam merealisasikan kesetaraan gender dalam pendidikan?

B. Sejarah Pemikiran dan Gerakan Kesetaraan Gender

¹ Media Indonesia, *Kesetaraan Gender di Indonesia Masih Rendah*, MI, 08 Oktober 2020.

² Novita Tresiana, dkk, *Profil Perempuan Provinsi Lampung 2019*, (Bandar Lampung, LPPM Unila dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung, tahun 2019).

Secara etimologis "gender" berasal dari bahasa Inggris yang berarti jenis kelamin.³ Dalam kamus *Webster's New World Dictionary*, gender diartikan sebagai perbedaan yang tampak antara laki-laki dan perempuan dalam hal nilai dan perilaku.⁴ Berdasarkan pengertian dari dua kamus itu terlihat bahwa gender bisa juga diartikan sebagai perbedaan jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga diartikan sebagai perbedaan berdasarkan nilai dan perilaku antara laki-laki dan perempuan.

Para ahli tentang gender secara berbeda-beda mendefinisikan gender dalam perspektif yang beragam. Misalnya Hillary M Lips, sebagaimana dikutip oleh Mufidah mengartikan gender sebagai "cultural expectation for women and men" yang berarti berbagai harapan ideal antara relasi laki-laki dan perempuan.⁵ Sementara itu bagi Margaret L Andersen lebih luas lagi, di samping mengartikan gender sebagai perbedaan objektif berdasarkan jenis kelamin, akan tetapi gender menurutnya merupakan kesempatan yang sama secara sosiologis antara laki-laki dan perempuan dalam konteks peranan sosial, bukan semata-mata perbedaan berdasarkan jenis kelamin.⁶ Menurut Mufidah, setelah membandingkan pendapat-pendapat ahli tentang gender, menyatakan bahwa gender adalah pembedaan peran, fungsi dan tanggung jawab antara perempuan dan laki-laki yang dihasilkan dari konstruksi sosial budaya dan dapat berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Gender juga dapat dipahami sebagai jenis kelamin sosial.⁷

Dalam konteks sejarah, sejak zaman Yunani Kuno dan Romawi, disinyalir gerakan gender yang digerakkan oleh feminisme telah ada, akan tetapi gerakan tersebut masih samar-samar. Plato misalnya menyinggung peran perempuan dalam politik dan dapat berpartisipasi sepenuhnya dalam negara, sebagai warga negara. Tulisan tersebut dapat ditemukan dalam karyanya yang berjudul *Republic*. Oleh karena itu Plato oleh sebagian kalangan dikategorikan sebagai laki-laki pertama yang menyuarakan gerakan feminisme. Walaupun dalam beberapa pemikirannya masih tidak konsisten tentang perempuan, dan menganggap bahwa perempuan masih banyak kelemahannya.⁸

Pada abad pertengahan atau era skolastik, di mana filsafat di bawah kontrol gereja Katolik, muncul kesadaran feminisme di kalangan biarawati, yang menolak hirarkhi dan dominasi di gereja yang sangat maskulin. Pada tahun 1405 Cristine de Pizzan menulis sebuah buku yang berjudul *The Book of The City of*

³ John Echols dan Hasan Shadili, *Kamus Inggris Indonesia* (Gramedia: Jakarta, 1984) h. 256

⁴ Elaine Neufeldt, *Webster's New World Dictionary*, (New York: Webster's New World Cleveland, 1984), h. 561.

⁵ Mufidah, *Bingkai Sosial Gender, Islam Strukturasi dan Konstruksi Sosial*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2010) h. 1. Hillary M Lips, *Sex and Gender: A Introduction*, (London, 1993) h.

⁶ Mufidah, *Bingkai Sosial Gender*, h. 2. Margaret L Andersen, *Thinking About Women Sociological Perspectives on Sex And Gender* (New York: Macmillan Publishing Company, 1988), h. 75.

⁷ Mufidah, *Bingkai Sosial Gender*, h. 5.

⁸ Alifia Putri Yudanti, *Sejarah Feminisme Barat, Perjuangan untuk Keadilan Gender*, dalam kumparan.com.

Ladies, yang menggambarkan masyarakat utopis yang menempatkan perempuan secara bebas seperti laki-laki. Kemudian disusul oleh Marie de Gourany yang menulis buku *The Equality of Men and Women* tahun 1622M, buku ini menjadi dasar-dasar gerakan equality perempuan dan laki-laki, dan mulai mempengaruhi pemikiran tentang kesetaraan gender atau kesamaan hak antara laki-laki dan perempuan, dan persamaan hak (equal rights) secara universal.⁹

Setelah era renaissance, filsafat memasuki era modern, setelah melewati masa pencerahan (*aufklärung*) di Eropa dan masa Modern inilah gerakan kesadaran gender mulai muncul, karena ciri filsafat modern itu sendiri menekankan pada pemikiran, rasional, empiris, kritisisme, dan humanisme.¹⁰ Dengan semangat paradigma sains yang bisa digunakan untuk menggugat kemapanan sebuah teori yang dianggap benar dilakukan secara kritis, karena kebenarannya ilmiah juga bersifat tentatif, selama belum ada teori lain yang menggugurnya. Begitu termasuk doktrin-doktrin tentang posisi perempuan yang selama ini dianggap sebagai sesuatu yang tabu untuk dikritik, maka semangat kritisisme dan humanisme dalam filsafat modern, mulai mempertanyakannya dan lahirlah pemikiran-pemikiran dan kesadaran kemanusiaan yang berusaha menggugat posisi perempuan yang masih marginal, melalui tulisan-tulisan dan pergerakan emansipasi perempuan di Eropa. Gerakan feminisme, emansipasi dan kesetaraan gender mulai menyeruak pada masuk abad ke 19, dan terus berkembang ke seluruh penjuru dunia. Kebanyakan dilakukan oleh para aktifis perempuan.

Setelah revolusi Perancis muncul sebuah karya aktifis HAM, Olympe de Gouze yang menulis *Declaration of The Right of Women and The Female Citizen* tahun 1791. Buku ini ditulis berdasarkan pengalaman pribadi De Gouze sendiri yang menikah pada usia 17 tahun. Setelah menikah justeru dia semakin produktif menulis beberapa karya pemikiran tentang peran perempuan di bidang politik, begitu juga mengkampanyekan tentang penolakan terhadap perbudakan, hak perceraian, dan isu-isu sosial perempuan lainnya. Serta kritik-kritik yang tajam, terutama dalam menyuarakan hak politik perempuan di perancis, menyebabkan dia di hukum mati oleh rezim Robespierre.¹¹

Tulisan lain yang terkenal dalam menyuarakan kritik politik yang tidak melibatkan perempuan pernah di tulis oleh Mary Wollstonecraft, yang berjudul *A Vindication of The Right of Woman*, (1792M), tulisan ini berisi tentang kritikan sejarah revolusi Perancis yang tidak pernah menyebutkan dan peran perempuan, bahkan cenderung menggambarkan laki-laki dan sama sekali tidak menyebutkan peran perempuan pada revolusi itu, seakan-akan peran perempuan dicoret dalam sejarah revolusi perancis tersebut.¹² Mary Wollstonecraft, sesungguhnya merupakan filosof perempuan Inggris yang datang ke Perancis saat Revolusi Perancis, dalam karyanya yang terkenal itu, ia mengkritik pemikiran yang menyatakan bahwa perempuan harus bergantung pada laki-laki, bahkan Mary

⁹ Alifia Putri Yudanti, *Sejarah Feminisme Barat*,

¹⁰ Ahmadi, *Ideologi Pendidikan Islam, Paradigma Humanisme Teosentris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 39

¹¹ Alifia Putri Yudanti, *Sejarah Feminisme Barat*,

¹² Flavia Yunazar, *Perjalanan Feminisme*,

juga mengkritik pemikiran filosof Perancis yang terkenal J.J Rouseau mengenai perempuan yang diciptakan untuk membantu dan membuat senang laki-laki.¹³

Walaupun demikian ada pendapat lain yang mengatakan bahwa gerakan gender dan feminisme mulai muncul sejak abad ke 18 dan berkembang pesat pada abad ke 20. Pada tahun 1890 an istilah feminisme muncul yang berasal dari bahasa Latin dari kata Femina atau perempuan, dan aktivisnya disebut feminis. Gerakan ini pada dasarnya memperjuangkan emansipasi atau keadilan dan kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan serta gerakan untuk memperoleh hak-hak perempuan Pada prinsipnya gerakan feminisme atau gerakan gender merupakan advokasi perempuan untuk mendapatkan hak-hak perempuan yang setara dibidang politik, ekonomi, dan sosial.¹⁴

Semangat gender menjadi isu menarik pada awal 1880an, karena pada era ini muncul isu mengenai diskriminasi gender dan kelas. Saat itu lahir pemikiran-pemikiran mengenai harapan kesetaraan gender dan kehidupan yang layak. Tokoh-tokoh feminisme yang muncul pada era itu, antara lain Claire Demar, seorang jurnalis sekaligus penulis dan anggota gerakan Saint-Simonis, yang banyak meyuarkan kritik tentang masalah-masalah gender. Aktifis lainnya yaitu Jeanne Deroin merupakan seorang feminis-sosialis Perancis yang mengkapanyekan bahwa perempuan dan laki-laki mempunyai perbedaan preferensi sehingga harus mewakili dirinya masing-masing. Bagi Deroin, kesetaraan gender tidak akan pernah terwujud, jika perempuan selalu harus diwakili laki-laki.¹⁵

Tokoh feminisme lainnya adalah Flora Tristan yang menulis *The Worker's Union* tahun 1843, yang mengemukakan pemikiran bahwa laki-laki dan perempuan harus mempunyai kesempatan profesional yang sama dan dia menolak opresi terhadap perempuan dan paham proletarianisme. Di Amerika mencatat terjadi pertemuan atau konferensi perempuan pertama, yaitu *Seneca Falls Convention* tahun 1848 di Seneca Falls, New York. Dalam komunique bersama disepakati tentang hak-hak perempuan dan keadilan gender. Dalam pertemuan yang dihadiri peserta 399 peserta itu, berhasil menghasilkan sebuah deklarasi, *Declaration of Righ and Sentimens*. Di samping itu pada tahun 1851, tokoh perempuan kulit hitam bernama Sojourner Truth, dia merupakan aktifis pekerja perempuan, yang ikut dalam Konvensi Hak Asasi Wanita Ohio pada tahun 1851.

Sojourner, mengkritik terhadap gerakan perempuan pada masa itu yang masih diskriminatif terhadap perbedaan warna kulit, ras dan kelas tertentu.¹⁶ Secara faktual Sojourner adalah aktifis gender yang berkulit hitam, keturunan Afrika, sehingga dia merasakan betul diskriminasi rasialis di Amerika pada masa itu, termasuk terhadap para perempuan.

Pada abad ke 20 hingga abad ke 21, gerakan gender semakin massif, tersebar diberbagai negara, atensi terhadap masalah gender secara internasional misalnya bisa dilihat dari lahirnya komitmen internasional pada tahun 1978 yang

¹³ Alifia Putri Yudanti, *Sejarah Feminisme di Barat*

¹⁴ Flavia M Yunazar, *Studen.s Column, Perjalanan Feminisme di Indonesia dan Tokohnya*, Binus University, communication. Binus. ac. Id.

¹⁵ Alifia Putri Yudanti, *Sejarah Feminisme*

¹⁶ Alifia Putri Yudanti, *Sejarah Feminisme di Barat*

melahirkan sebuah konvensi perlawanan terhadap tindakan diskriminasi perempuan yaitu CEDAW (*Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against The Womens*), dan lahirnya sebuah komintmen terhadap gender, *Gender Mainstreaming* tahun 1995.¹⁷ Pergerakan mainstreaming gender juga masuk ke Indonesia melalui kesadaran perempuan dalam berbagai bidang terutama dalam pendidikan dan karir perempuan.

C. Kesetaraan Gender Dalam Pendidikan

Wacana gender sebagai sebuah gerakan keagamaan artinya bukan sebagai gerakan sekuler telah diperjuangkan oleh para aktifis muslim, sejak tahun 1980 dan 1990 mulai berpengaruh di Indonesia terutama pada para aktifis gender. Hal ini terjadi karena beberapa buku-buku penulis muslim tentang gender dalam Islam mulai diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, karya-karya aktifis gender muslim, semisal Aminah Wadud Muhsin, Fatimah Mernisi, Zahrullah Khan dan lain sebagainya. Meskipun begitu buku-buku tersebut oleh sebagian kelompok fundamentalis dianggap kontroversial.¹⁸

Memang pada era tahun 1980 an dan tahun 1990 an, situasi pemikiran di Indonesia mulai dipengaruhi oleh gerakan pembaruan Islam, baik melalui karya-karya intelektual muslim Indonesia, seperti Nurcholis Madjid, Abdurrahman Wahid, Jalaluddin Rahmat, Amin Rais, Kuntowijoyo, dan lain-lain. Buku-buku itu menjadi bahan bacaan mahasiswa muslim di seluruh perguruan tinggi Islam. Termasuk buku-buku terjemahan dari penulis muslim dari luar negeri, misalnya Syed Husein Nasr, Fazlurrahman, Rifat Hasan, Maryam Jamelah dan lain-lain. Pada umumnya buku-buku mereka juga membahas wacana gender dalam Islam, sehingga tidak heran kesadaran gender di kalangan kaum muslim terpelajar mulai berkembang hingga sekarang, telah melahirkan aktif gender di Indonesia. Kalau bisa disebut bahwa pada era tahun 1980 sampai akhir tahun 1990an, pengaruh aliran intelektual Islam di Indonesia berkembang pesat, sehingga muncul berbagai corak pemikiran yang berbeda-beda, misalnya kelompok pemikir yang dianggap neo-Muktazilah, misalnya corak pemikiran Harun Nasution, kemudian pemikiran Neo Modernisme Islam yang dikembangkan oleh Nurcholish Madjid, dan Abdurrahman Wahid dan sebagainya.

Khusus tema-tema tentang pemikiran gender dalam Islam melahirkan pemikir muslim yang menuliskan gagasan pemikirannya dalam majalah *Ulum al-Qur'an*, yang pada era 1990 an yang dipandang sebagai jurnal yang sangat berbobot, kompeten dalam bidang studi Islam dan pemikiran Islam di Indonesia, karena penulis-penulis artikelnya adalah tokoh-tokoh cendekiawan muslim terkenal. Tidak hanya dalam majalah tema-tema gender juga telah menjadi judul-judul penelitian setingkat disertasi dan buku-buku terbitan lainnya. Misalnya disertasi yang disusun Zaitunah Subhan. Kemudian buku-buku karya ulama dan intelektual muslim Indonesia, seperti Buya Hamka, Mahmud Yunus, Nasaruddin Umar.¹⁹ Kajian tentang gender di Indonesia

¹⁷ Tolchah Hasan, Pengantar, dalam Mufidah, *Bingkai Sosial Gender*, h. Vi.

¹⁸ Mufidah Ch, *Bingkai Sosial Gender*, h. 40.

¹⁹ Mufidah Ch, *Bingkai Sosial Gender*, h. 42.

mamasuki abad ke 21, atau tahun 2000an, kian berkembang lagi, dan melahirkan aktifis-aktifis gender yang beragam latar belakang akademiknya, intelektual, afiliasi keagamaannya dan lain sebagainya. Bahkan terlihat semangat gender semakin progresif melalui kegiatan-kegiatan yang nyata, terutama dalam konteks Indonesia dipengaruhi perubahan politik nasional pasca Reformasi 1998.

Pendidikan merupakan salah satu sarana penting yang berjasa dalam membentuk kesadaran gender di Indonesia, terutama di kalangan perempuan, di samping faktor ajaran agama, ideologi, pengaruhn budaya modern dari Barat yang juga berkembang di Indonesia. Hal ini bisa dilihat dari munculnya tokoh-tokoh perempuan di Indonesia yang sadar akan pentingnya kesetaraan gender berasal dari kaum perempuan yang terdidik, baik pengaruh pendidikan Barat modern, atau tokoh-tokoh perempuan yang didik secara tradisional di pesantren dan madrasah-madrasah. RA. Kartini misalnya beliau terkenal sebagai tokoh emansipasi wanita pada abad ke 19 di Indonesia. Kartini merupakan perempuan ningrat yang terdidik secara Barat di sekolah yang didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda. Kemampuan kartini berbahasa Belanda dijadikan sebagai senjata untuk memperjuangkan kesetaraan gender pada masanya, melalui tulisan-tulisan tangannya sehingga lahirlah buku "Dari Gelap Terbitlah Terang". Buku ini merupakan ekspresi keprihatinan Kartini terhadap kondisi perempuan pada masanya yang masih sangat rendah pendidikannya, bahkan kebanyakan tidak pernah sekolah, sehingga praktis perempuan pada masa itu banyak yang masih buta huruf dan suram masa depannya. RA Kartini secara aktif kemudian melakukan perjuangan dengan mendirikan sekolah-sekolah puteri yang bertujuan memajukan derajat perempuan dengan mendidik mereka di sekolah tersebut, untuk memberikan bekal pada mereka menghadapi masa depan yang lebih baik.²⁰

Di samping Kartini, ada juga tokoh-tokoh perempuan yang mendapatkan didikan secara agama, dan menjadi tokoh emansipasi perempuan, misalnya El Yunusiah di Sumatera Barat, dan Nyai Ahmad Dahlan yang terkenal gerakannya memajukan pendidikan kaum muslimat di Indonesia, melalui pendidikan dan dakwah. Bukan berarti Kartini tidak didik secara agama, dalam beberapa literatur yang ada, RA. Kartini (1879-1909) tercatat sebagai santri dari KH, Saleh Darat di Semarang, jadi ada kemungkinan gagasan emansipasi perempuan Kartini juga dibentuk dari hasil belajar agama pada Kyai Saleh Darat.

Perjuangan gender pada masa kolonial Belanda telah diperjuangkan oleh perempuan pada zamannya. Pada awalnya perjuangan semua bersifat individual dan kedaerahan, seperti Kartini, dan Dewi Sartika dan sebagainya. Akan tetapi pada masa pergerakan, mulai bermunculan organisasi Islam maupun nasionalis yang mempunyai bagian organisasi perempuan yang berjuang untuk kesetaraan gender atau bagian yang mengurus peran perempuan. Muhammadiyah (1912) misalnya mempunyai organisasi Aisyah tahun 1920 yang dipimpin tokoh-tokoh perempuan Muhammadiyah. Kemudian NU (1926) mempunyai organisasi Muslimat dan Fatayat. Sebelumnya Boedi Oetomo (1908) yang juga mempunyai organisasi perempuan, Poetri Mardika yang lahir tahun 1912.

²⁰ Syahrul Amar, *Perjuangan Gender Dalam Dalam Kajian Sejarah Wanita Indonesia Abad XIX*, Jurnal *Fajar Hitoria*, Vol 1 Edisi 2 2017, h. 110.

Begitu juga organisasi perempuan juga lahir dari agama Katolik, Protestan dan lain sebagainya.²¹

Gerakan gender atau feminisme secara modern pasca kemerdekaan mulai muncul dan terdengar kembali di Indonesia sekitar tahun 1960 an. Pada tahun 1970an gerakan gender mulai menjadi isu pembangunan. Tahun 1985-1995 mulai muncul gerakan secara masif untuk mengadvokasi perempuan setelah terjadi kasus-kasus hukum yang banyak melibatkan korban perempuan, advokasi hukum juga upaya untuk meningkatkan derajat perempuan. Sejak saat itu ada upaya untuk mengintegrasikan gender ke dalam seluruh kebijakan pemerintah, organisasi masyarakat, lembaga pendidikan dan lain-lain.²²

Pada era kemerdekaan RI, gerakan perempuan Indonesia tersebar dan diwakili dalam organisasi-organisasi sosial keagamaan dan organisasi sosial politik yang ada di Indonesia. Misalnya dalam organisasi Muhammadiyah, NU, al-Wasliyah dan lain sebagainya. Termasuk organisasi perempuan yang ada di dalam partai-partai politik yang ada di Indonesia yang ikut dalam kontestasi politik dalam negeri dan pemilu. Dalam konteks tertentu parpol-parpol yang ada bisa memobilisasi kaum perempuan untuk kegiatan-kegiatan politik sesuai dengan trend politik yang terjadi.

Di Indonesia perlindungan terhadap perempuan telah direalisasikan dalam beberapa regulasi yang mengatur tentang perlindungan perempuan. Misalnya UU No. 7 Tahun 1984 tentang Penghapusan Terhadap Segala Bentuk Diskriminasi Perempuan. Inpres No.9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional. Kemudian UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Undang-Undang No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Perdagangan Orang. Begitu juga beberapa peraturan lainnya yang mengatur perlindungan perempuan dan anak.²³ Dari berbagai regulasi tersebut pemerintah Indonesia terlihat memiliki komitmen kuat terhadap perlindungan perempuan, terbukti telah dikeluarkannya sejumlah Undang-undang dan berbagai peraturan yang melindungi hak-hak perempuan dalam kehidupan sosial, politik, kenegaraan dan lain sebagainya, termasuk hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Meskipun demikian kesetaraan gender dalam pendidikan juga masih cukup banyak persoalan yang terjadi, terhadap peran perempuan dalam dunia pendidikan.

Setelah reformasi politik di Indonesia perhatian negara terhadap masalah gender terlihat semakin serius. Hal ini bisa dilihat dalam Instruksi Presiden/ Inpres No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional, yang menekankan pentingnya pengarusutamaan gender dalam segala bidang, termasuk di bidang pendidikan yang bisa meningkatkan peran serta perempuan dan meningkatkan derajatnya setara dengan kaum pria. Dalam

²¹ Sri Hidayati Djoeffan, *Gerakan Feminisme di Indonesia di Indonesia Tantangan dan Strategi Mendatang*, dalam Jurnal Mimbar, No. 3 tahun XVII Juli- September 2001, h. 3-4.

²² Flavia M Yunazar, *Perjalanan Feminisme di Indonesia dan Tokohnya*, Binus University.

²³ Tolchah Hasan, Pengantar dalam Mufidah, *Bingkai Sosial Gender*, h.vi.

Inpres No. 9 tahun 2000 ditandatangani oleh Presiden Abdurrahman Wahid tanggal 19 Desember tahun 2000. Salah satu inti dari Inpres adalah untuk meningkatkan kualitas dan partisipasi perempuan dalam pelaksanaan pembangunan nasional

Setelah Inpres No, 9 Tahun 2000 tersebut kemudian bermunculan berbagai regulasi pemerintah yang berkaitan dengan masalah gender di Indonesia. Salah satunya adalah keluarnya Permendiknas Nomor 84 tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam pendidikan yang ditandatangani oleh Mendiknas, Bambang Soedibyo tanggal 28 Desember 2008. Permen ini lahir jauh setelah Presiden Abdurrahman Wahid tidak menjabat sebagai Presiden pada tahun 2001. Ini mengindikasikan bahwa kesadaran gender mulai serius diperhatikan oleh pemerintah sejak era reformasi terutama pada masa pemerintahan Gus Dur. Kemudian pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono lahir Permendiknas Nomor 84 tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pendidikan.

Meskipun Inpres tersebut secara eksplisit ditujukan untuk Departemen Pendidikan Nasional untuk melaksanakan pendidikan yang responsif gender atau pengarusutamaan gender dalam bidang pendidikan. Namun kebijakan itu juga berkembang di Departemen Agama yang kemudian mengikutinya dengan merespon kebijakan pengarusutamaan gender tersebut, dengan jalan membentuk tim PUG (Pengarusutamaan Gender) di Lingkungan Departemen/Kementerian Agama RI. Kebijakan pemerintah ini mendapat sambutan yang baik dari lapisan sosial secara luas, termasuk di lingkungan pendidikan di bawah payung Kementerian Agama.

Selain pemerintah, beberapa LSM yang konsens terhadap permasalahan kesempatan pendidikan bagi perempuan. Misalnya *Network fo Education Watch Indonesia* (NEW Indonesia) atau Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JIPPI) yang memiliki perhatian terhadap upaya mendorong pendidikan di Indonesia yang adil dan berkualitas, juga melakukan sejumlah pelatihan tentang gender mainstreaming dalam kebijakan pendidikan.²⁴ Hal ini dilakukan sebagai bentuk implementasi dari amanat UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Pasal 4 ayat 1 yang menyatakan bahwa "Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural dan nilai kemajemukan bangsa". Dan yang paling esensial tentang kesempatan pendidikan, terdapat dalam Pasal 5 ayat 1 yang berisi "Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan bermutu".

Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik benang merahnya, bahwa negara menjamin semua warga negara mempunyai hak yang sama dalam bidang pendidikan tanpa diskriminasi berdasarkan apapun, termasuk jenis kelamin, agama, etnis, budaya dan lain sebagainya. Hal ini juga memperkuat kesempatan yang sama antara laki-laki dan perempuan untuk mengenyam pendidikan secara bersama, baik di lembaga-lembaga pendidikan formal

²⁴ NEW Indonesia, *Soal Keadilan Gender dalam Pendidikan, Indonesia Peringkat Utama di Asia*, 16 Oktober 2016.

maupun lembaga pendidikan non formal, karena semua dijamin oleh undang-undang dasar negara Republik Indonesia.

D. Perkembangan PKBM di Indonesia

UNESCO tahun 1998 memberikan definisi PKBM atau CLC (Community Learning Centre), sebagai berikut: *A CLC is a local educational institution outside of formal education system, for villages or urban areas, usually set up and managed by local people to provide various learning opportunities for community development and improvement of people's quality of life.*²⁵ Berdasarkan definisi tersebut bahwa PKBM merupakan lembaga pendidikan non formal yang berdiri atas inisiasi masyarakat dan dikelola oleh masyarakat itu sendiri baik di desa maupun di kota yang menyelenggarakan berbagai program pendidikan untuk masyarakat dalam rangka mengembangkan dan meningkatkan taraf hidupnya. Dalam perspektif ini tampaknya ide dan gagasan pendirian PKBM sangat menghargai prinsip-prinsip demokrasi pendidikan. Dari definisi tersebut juga menguatkan bahwa perkembangan PKBM mulai marak di dunia sekitar tahun 1990 an.

Sejarah berdirinya Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) di Indonesia juga tidak bisa dilepaskan dari sejarah berdirinya lembaga tersebut dalam perspektif global, munculnya gerakan kesetaraan di bidang pendidikan dan demokrasi pendidikan di dunia. Kemunculan gerakan kesadaran dibidang dengan slogan " pendidikan untuk semua" (*Education for All*) pada saat itu menjadi semacam kesadaran universal yang menjadi moment penting lahirnya semacam aksi-aksi nyata dalam pemberdayaan masyarakat dalam bidang pendidikan tanpa membedakan kelas sosial, termasuk perbedaan gender. Dalam perspektif lain, perkembangan CLC ada yang menyebutkan bahwa kemunculan CLC berasal dari beberapa negara yang mengalami kesulitan di bidang pendidikan. Misalnya Jepang, ide semacam CLC telah ada sejak tahun 1948 pasca kekalahannya dalam PD II, dengan sebutan *Kominkan* dengan semangat kebangkitan kembali masyarakatnya dari keterpurukan dan meningkatkan kualitas sumberdaya manusianya. Namun kebanyakan para ahli pendidikan nonformal menyatakan bahwa munculnya gagasan pendidikan non formal yang berbentuk CLC baru mengemuka.

Sarah Simson menyatakan bahwa munculnya CLC di Amerika terjadi sejak tahun 1990 an. Dia menyatakan bahwa pendirian CLC atau PKBM di Amerika pada tahun 1994, meskipun gagasan pembentukan lembaga pendidikan tersebut pernah diprogramkan pada tahun 1965 terutama dalam pendidikan dasar yang terkenal dalam program *The Improving America's School Act*, pada tahun 1994, sebagai penyempurnaan program yang pernah digagas pada tahun 1965 dengan program *Elementary and Secondary Education Act*. Pada tahun 1995 program pendidikan dalam CLC di Amerika makin dimekarkan lagi tidak hanya menasar pendidikan, tetapi juga kesehatan, pelayanan sosial dan lain sebagainya. Keberadaan lembaga pendidikan ini terus berkembang hingga sekarang.²⁶

²⁵ *Community Learning Centre*, Unesco 1998

²⁶ Sarah Simson, *A Brief History of 21 st Century Community Learning Centers*, Afterschool Snack, dalam [www. Afterschoolingalliance. Org](http://www.Afterschoolingalliance.Org).

Mengenai kemunculan PKBM di Indonesia terjadi perbedaan pendapat di antara para ahli. Dalam beberapa literatur disebutkan bahwa PKBM lahir di Indonesia pada pertengahan tahun 1970-an dengan tujuan memberikan pelayanan pendidikan bagi masyarakat berupa pendidikan luar sekolah atau pendidikan non formal yang berbasis pada masyarakat. Kemudian pada tahun 1990-an di bawah Direktorat Pendidikan Masyarakat (Dikmas), Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Perkembangan PKBM semakin meningkat terutama setelah terjadinya krisis 1998 atau pada era Reformasi, di mana pada saat itu terjadi krisis ekonomi, dan krisis politik, di mana layanan kebutuhan pendidikan juga semakin meningkat, yang ditandai oleh meningkatnya penduduk miskin dan tingginya anak putus sekolah, setingkat SD, SMP dan SMA. Keberadaan PKBM sebagai lembaga pendidikan non formal sangat dibutuhkan oleh mereka yang terdampak krisis ekonomi, untuk melanjutkan jenjang pendidikan melalui jalur pendidikan non formal, termasuk sebagai lembaga yang memberikan keterampilan praktis atau life skill.

Pendapat lain juga sejalan dengan pernyataan di atas bahwa di Indonesia CLC atau PKBM mulai digagas melalui beberapa riset di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sejak tahun 1997 dan lahir nama Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM). Pasca krisis politik era reformasi, PKBM mulai terlihat bentuknya dan mendapat apresiasi yang tinggi dari masyarakat. Pada periode tahun 2002 hingga sekarang tahun 2021 PKBM mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang sangat pesat. Meskipun pada era reformasi PKBM yang muncul merupakan inisiatif murni dari masyarakat tetapi keberadaannya semakin kuat, karena didukung oleh pemerintah dan sekaligus keberadaannya diakui dalam UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang mengakui dan memperkuat PKBM sebagai Satuan Pendidikan Nonformal. Dengan demikian posisi kuat PKBM secara resmi mendapatkan perhatian karena ada dalam undang-undang tersebut.

Eksistensi program PKBM pada tahun 2000an menjadi progresif karena didukung dan dilindungi oleh pemerintah, sebagai sarana pengembangan SDM Indonesia yang berdaya saing, dalam konteks ini pemerintah berfungsi sebagai agent konsultatif bagi kegiatan penting PKBM. Namun demikian ada juga yang mengkaitkan keberadaan PKBM dewasa ini tidak bisa dilepaskan dengan program pemberantasan buta aksara yang telah dirancang sejak Indonesia merdeka sekitarn tahun 1950-an, dan pada era Orde Baru tahun 1980-an melalui program pemberantasan buta huruf dan wajib belajar yang semakin digaungkan pada tahun 1990-an. Tidak heran jika tahun 1990 bisa dianggap sebagai awal kesadaran pendidikan untuk semua, terutama sejak deklarasi dunia tentang *Education for All* (pendidikan untuk semua) pada tahun itu, di Jomtien, Thailand. Kemudian ditindaklanjuti dengan ide pendirian CLC (*Community Learning Center*), dan gagasan ini terus menyebar ke seluruh dunia termasuk di Indonesia, dengan bentuk Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), sebuah lembaga pendidikan luar sekolah yang disetarakan dengan sekolah formal terutama ijazah yang dikeluarkan oleh lembaga tersebut, dalam membantu masyarakat yang tidak sempat mengenyam pendidikan formal, tentunya dengan serangkaian pembelajaran dan ujian yang diakui oleh negara.

Pada umumnya PKBM didirikan dan diselenggarakan oleh masyarakat atau lembaga swasta, namun ternyata ada juga PKBM yang dikelola oleh negara atau PKBM Negeri, seperti PKBM Negeri 17 Penjaringan Jakarta Utara, kemudian PKBM Negeri 37 Jakarta yang semua dikelola oleh pemerintah daerah DKI Jakarta. Di samping itu, PKBM juga mempunyai kegiatan yang mirip dengan lembaga pendidikan luar sekolah lainnya misalnya Rumah Pintar (RUMPIN), dan Kelompok Belajar Usaha (KBU), TBM (Taman Belajar Masyarakat) bahkan di luar negeri juga ada PKBM yang didirikan oleh diaspora WNI atau tenaga kerja Indonesia di luar negeri. PKBM terdapat di beberapa negara misalnya PKBM PPI Taiwan yang mempunyai akreditasi A (Unggul), PKBM di Serawak Malaysia dan lain sebagainya. Dalam konteks ini dapat dilihat bahwa PKBM juga harus melalui proses akreditasi, sama halnya dengan lembaga pendidikan formal seperti sekolah dan madrasah. Akreditasi PKBM juga dilakukan di dalam negeri untuk menilai kualitas PKBM yang ada.

Tampaknya dalam hal kualitas pelaksanaan pembelajaran di PKBM tidak bisa sembarangan karena ada badan akreditasi eksternal yang menentukan kualitas dan peringkatnya. Walaupun secara realitas menurut kronologis perkembangan PKBM di Indonesia tidak terlepas dari program-program kejar paket A, B, dan C, di mana pada masa lalu meruapakan program pemerintah untuk pemberantasan buta huruf di kalangan masyarakat. Namun kemudian program itu berkembang terutama pada era Orde Baru, yang mencanangkan program Wajar (wajib belajar) yang mewajibkan pendidikan warga negara Indonesia minimal berpendidikan dasar 6 tahun, setingkat SD, kemudian diteruskan menjadi Wajib Belajar 9 tahun dan terakhir 12 tahun, artinya minimal masyarakat Indonesia minimal pendidikannya setingkat pendidikan menengah atas.

Pada konteks sejarahnya program wajib belajar (Wajar) telah dicanangkan secara nasional pada dekade awal 1980 an, pada masa pemerintahan presiden Suharto. Pada saat itu menteri Nugroho Notosusanto memprakarsai program Wajar tersebut. Menurut Darmaningtyas, namun begitu sebenarnya wajib belajar 6 tahun atau serendah-rendahnya lulus SD itu sudah diamankan dalam UU No. 4 tahun 1950, namun karena kondisi itu negara Republik Indonesia baru merdeka sehingga program itu tidak berjalan dengan baik. Pada era Suharto, menteri pendidikan dan kebudayaan dijabat oleh Nugroho Notosusanto meluncurkan program Wajib Belajar 6 tahun dimulai dengan serius. Suharto sebagai presiden menginginkan generasi muda berusia 7 hingga 12 tahun paling tidak bisa sekolah sampai lulus SD.²⁷

Program wajib belajar ini akhirnya berhasil dicanangkan pada hari Pendidikan Nasional tanggal 2 Mei 1984, mengikuti hari lahir Ki Hajar Dewantara. Dengan melalui upacara di Stadion Utama Senayan, presiden Suharto bersama ibu Tien Suharto, tujuan gerakan Wajar ini menurut Suharto untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, sesuai amanat UUD 1945. Gerakan ini akhirnya mendapat antusiasme masyarakat, menurut menteri Koordinator Kesejahteraan Masyarakat pada waktu itu, Alamsyah Ratu Perwira Negara,

²⁷ Petrik Matanasi dalam Tirto. Id. " Mengenang Lahirnya Program Wajib Belajar", edisi 02 Mei 2019.

menyebutkan lebih dari 1,2 juta anak usia sekolah yang tidak mampu belajar di sekolah, dan sekitar 700 ribu yang putus sekolah pada tahun 1984, ketika program Wajar ini mulai dicanangkan. Pemerintah Orde Baru sejak awal 1980 an telah membangun sekolah-sekolah SD Inpres di wilayah-wilayah pedesaan untuk mendukung kegiatan tersebut. Untuk lancarnya program Wajib belajar 6 tahun itu pula, pemerintah menggencarkan gerakan orang tua asuh, yang terkenal dengan GNOTA (Gerakan Nasional Orang Tua Asuh). Namun belum genap setahun program Wajar 6 tahun dan GNOTA, menteri Pendidikan dan Kebudayaan (P&K), Nugroho Notosusanto, meninggal dunia tanggal 3 Juni 1985.²⁸ Akan tetapi program wajar ini terus dilanjutkan dan dikembangkan hingga sekarang. Satu dekade kemudian tepatnya pada tahun 1994, Wajar ditingkatkan menjadi 9 tahun atau setingkat SMP, berarti serendah-rendahnya pendidikan masyarakat Indonesia, harus setingkat lulusan SMP. Tampaknya program Wajar oleh pemerintah RI terus ditingkatkan levelnya hingga pada tahun 2015, program Wajib belajar ditingkatkan lagi menjadi Wajar 12 tahun. Untuk mendukung program tersebut mulai digalakkkan pendidikan dari berbagai jenjang dan jenisnya sesuai dengan undang-undang sistem pendidikan nasional, dan lembaga-lembaga pendidikan pun semakin banyak jenisnya termasuk lembaga-lembaga pendidikan luar sekolah atau lembaga pendidikan non-formal, semacam PKBM dan lain sebagainya.

Setelah reformasi tahun 1998 program pendidikan non formal atau pendidikan luar sekolah, terutama yang mendukung Wajib Belajar termasuk program pemberdayaan masyarakat dan partisipasi masyarakat Indonesia terus mengalami perubahan dan mendapatkan prioritas utama. Hal ini bisa dilihat dari sisi anggaran pendidikan yang terus ditingkatkan, dan ditetapkan dalam Undang-undang yang mengamanahkan bahwa anggaran pendidikan harus dialokasikan sebanyak 20 % dari jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN setiap tahunnya. Keberadaan lembaga pendidikan yang berusaha memberdayakan kualitas dan jenjang pendidikan non-formal atau pendidikan luar sekolah terus berkembang, walaupun secara faktual lembaga-lembaga tersebut kebanyakan berasal dari swadaya masyarakat, termasuk PKBM yang dikembangkan oleh pihak swasta, dan sebagian ada juga yang dikelola oleh pemerintah daerah.

Secara regulatif dalam UU Sisdiknas (Sistem Pendidikan Nasional) Nomor 20 tahun 2003, tentang jenis dan jenjang pendidikan atau jalur pendidikan pada pasal 13 ayat 1 yang menyatakan bahwa "jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, nonformal dan informal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya".²⁹ Kemudian pada pasal 26 ayat 4 ditegaskan tentang jenis-jenis lembaga pendidikan non formal yang berbunyi "Satuan pendidikan nonformal terdiri atas lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat dan majelis taklim, serta satuan pendidikan yang sejenis".³⁰ Dalam pasal 26 ayat 4 tersebut, jelas sekali kedudukan PKBM sebagai salah satu lembaga pendidikan nonformal yang

²⁸ Petrik Matanasi dalam Tirta Majalah Sejarah.

²⁹ UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

³⁰ UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

diakui oleh pemerintah, dan sebagai bagian dari penyelenggara pendidikan formal, termasuk beberapa satuan pendidikan yang ada dalam pasal tersebut. Pasal itu juga mengatur satuan pendidikan di Indonesia. Sebagai salah satu satuan pendidikan nonformal, status PKBM kini semakin diperkuat dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) No. 81 tahun 2013, tentang *Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal* (PNF), sebagai penjabaran dari UU Sisdiknas tahun 2003. Disebutkan dalam pasal 3 bahwa keberadaan Satuan PNF (Pendidikan Non Formal), meliputi: 1. LKP (Lembaga Kursus dan Pelatihan), 2. Kelompok Belajar, 3. PKBM, 4. Majelis Taklim dan, 4. Satuan PNF sejenis.³¹

PKBM sebagai penyelenggara pendidikan non-formal berperan memberikan pendidikan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas hidup dan mengembangkan komunitas yang ada pada masyarakat, termasuk melaksanakan konsep pendidikan seumur hidup (*life long education*) secara aktual.³² Di samping itu PKBM juga menyelenggarakan program kesetaraan dalam pendidikan, bukan hanya menjadi pusat solusi bagi masyarakat untuk melanjutkan studi sesuai jenjang pendidikan yang berlaku di Indonesia, namun secara faktual PKBM juga melaksanakan misi kesetaraan gender dalam pendidikan karena sifatnya yang inklusif, artinya menyelenggarakan pendidikan secara terbuka untuk semua kalangan baik laki-laki maupun perempuan.

Salah satu program belajar PKBM yang cukup mulia adalah sebagai lembaga yang tetap konsisten dengan program pemberantasan buta huruf masa lalu dan sebagai tempat melaksanakan program pemberdayaan masyarakat melalui pemberantasan 3-buta (buta huruf, buta angka, dan buta pengetahuan dasar) serta program pelatihan lainnya, termasuk melaksanakan pendidikan kesetaraan untuk jenjang pendidikan SD, SMP, dan SMA/SMK dengan program Kelompok Belajar Paket A, B dan C.³³ Namun dalam konteks kekinian, masalah Tri-Buta tersebut terutama buta aksara, jumlahnya semakin sedikit bahkan hampir tidak ada lagi sehingga yang lebih identik dengan PKBM adalah sebagai lembaga pendidikan alternatif yang membantu mereka yang belum mengenyam pendidikan formal untuk mendapatkan kualifikasi akademik sesuai jenjang pendidikan yang diinginkan, melalui pendidikan kesetaraan Paket A, B, dan C. Di akui atau tidak program pendidikan kesetaraan tersebut sangat membantu masyarakat, dengan tetap mengikuti standar evaluasi yang ditetapkan oleh Kemendikbud.

Lebih dari itu di luar negeri keberadaan *Community Learning Centers* atau Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) menjadi alternatif pendidikan bagi

³¹ Permendikbud nomor 81 tahun 2013, tentang *Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal*.

³² Mita Septiani, *Pengalaman Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dalam Memfasilitasi Masyarakat Belajar Sepanjang Hayat*, dalam *Jurnal Ilmiah Visi PPTK PAUDNI* Vol. 10 No. 2 Desember 2016, h. 68.

³³ Mita Septiani, *Pengalaman Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)*

mereka yang terdiskualifikasi dalam jenjang pendidikan formal.³⁴ Tampaknya pendapat Reber lebih sesuai dengan konteks PKBM pada umumnya termasuk yang ada di Indonesia, sebagai lembaga pendidikan alternatif atau lembaga pendidikan non-formal yang membantu dan memberdayakan masyarakat untuk meningkatkan kualifikasi pendidikannya. Oleh karena itu PKBM yang baik harus memenuhi standar yang ditetapkan oleh Kemdikbud. Paling tidak PKBM yang memenuhi standar pendidikan antara lain harus memenuhi kriteria tertentu, misalnya mempunyai ruang belajar mengajar, mempunyai fasilitas bacaan masyarakat, mempunyai tenaga pendidik atau pelatih yang profesional dan didukung oleh manajemen pendidikan yang baik.³⁵

E. Pendidikan Kesetaraan Gender pada PKBM di Lampung

Sebagai lembaga pendidikan non formal yang menyelenggarakan pendidikan kesetaraan sebenarnya program pendidikan di PKBM sangat demokratis dan responsif gender. Kalau dilihat secara universal, fungsi dan peran PKBM dalam penyelenggaraan pendidikan responsif gender bisa dilihat dari fungsi PKBM itu sendiri, antara lain: sebagai tempat belajar masyarakat (*Learning Society*), sebagai tempat Tukar Belajar (*Learning Exchange*) informasi, ilmu pengetahuan, keterampilan dan lain-lain, Sebagai Pusat pengetahuan, informasi dan Perpustakaan masyarakat, sebagai Sentra pertemuan berbagai lapisan masyarakat, pemerintah, ormas, LSM dan lain sebagainya, dalam rangka pengembangan pendidikan pada masyarakat untuk melaksanakan *life long education* dan *life long learning*, dan Sebagai Pusat penelitian masyarakat (*community research centre*). PKBM bisa dijadikan sebagai tempat menggali, mengkaji atau menelaah berbagai persoalan pendidikan terutama dalam meningkatkan SDM melalui pendidikan non formal.³⁶

Berdasarkan fungsi PKBM tersebut dapat dipahami bahwa sesungguhnya PKBM sangat berperan penting dalam turut memberikan akses yang baik kepada masyarakat luas tidak dibatasi oleh sekat-sekat yang menjadi problem pendidikan modern. Terutama dalam menyelenggarakan pendidikan yang demokratis dan lepas dari paradigma diskriminasi gender, singkatnya keberadaan PKBM menjadi pendidikan alternatif yang responsif gender dan demokratis.

Dalam konteks pembelajaran yang responsif gender, menurut Mufidah dkk, paling tidak terdapat empat prinsip pengembangan pembelajaran inklusif gender. *Pertama*, kesamaan akses bagi laki-laki dan perempuan. *Kedua*, kesamaan partisipasi atau peranserta laki-laki dan perempuan. *Ketiga*, kesamaan kontrol/tanggung jawab laki-laki dan perempuan. *Keempat*, kesamaan manfaat

³⁴ Reber, M.F. "An Alternative Framework for Community Learning Centres in The 21st Century: A System Design approach toward the Creation of a Transformational Learning System" Dissertation.com.boopump.com.

³⁵ Deny Firmansyah Sutisna, dkk, *Peranan PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat dalam Menumbuhkan Minat Baca Warga Belajar*, dalam Student e-Journals, <http://journal.unpad.ac.id>. Id. 2012.

³⁶ Ditjen PLS 2001. Lihat Juga Sihombing, *Pendidikan Luar Sekolah Kini dan Masa Depan* (1999).

terhadap hasil pendidikan untuk laki-laki dan perempuan.³⁷ Tujuan pendidikan berprespektif gender paling tidak ada tiga. *Pertama*, mempunyai akses yang sama dalam bidang pendidikan antara laki-laki dan perempuan tanpa terkecuali. *Kedua*, mempunyai kewajiban yang sama antara laki-laki dan perempuan, dalam konteks mencari ilmu di lembaga-lembaga pendidikan. *Ketiga*, persamaan kedudukan dan peranan antara kaum perempuan dan laki-laki dalam berbagai kegiatan dalam membangun peradaban, dan kemajuan bangsa.³⁸

Dengan memperhatikan prinsip pembelajaran inklusif gender atau pendidikan berprespektif gender tersebut, maka PKBM yang responsif gender seharusnya juga menerapkan keempat prinsip itu dalam proses pembelajarannya, sehingga program kesetaraan gender dalam pembelajaran di PKBM bisa sesuai dengan idealitas sekaligus realitas keadilan gender dalam dunia pendidikan termasuk dalam pendidikan non formal. Praktek kesetaraan gender pada PKBM, bisa dilihat dari profil dan program pendidikan pada PKBM berikut ini:

1. PKBM Al-Suroya

PKBM Al-Suroya berdiri secara pada tahun 2008. Pada awalnya PKBM al-Suroya merupakan lembaga pendidikan berupa Pokjar (Kelompok belajar) yang menyelenggarakan pendidikan kesetaraan. Namun seiring perkembangan waktu pokjar tersebut berubah menjadi PKBM, dan pada tahun 2012 resmi berubah menjadi PKBM al-Suroya. Hingga saat ini PKBM al-Suroya mempunyai peserta didik 400 orang, dan tutor dan tenaga pendidik sebanyak 20 orang.

PKBM al-Suroya berkembang sangat pesat, dengan fasilitas pendidikan yang lengkap berupa ruang belajar dan praktek berlantai 3. Pembelajaran pada masa pandemik dilaksanakan secara online, dengan memperhatikan protokol kesehatan. Saat ini PKBM Al-Suroya menyelenggarakan Program pendidikan antara lain : Pendidikan Kesetaraan (Paket B dan C), Pendidikan anak Usia Dini (PAUD), Pendidikan Kecakapan Wirausaha, Taman Bacaan Masyarakat (TBM), Kursus Komputer, dan Sanggar Seni³⁹

Untuk memberikan keterampilan praktis bagi para peserta didiknya, PKBM al-Suroya juga memberikan pelatihan keterampilan praktis kepada peserta didik, antara lain misalnya keterampilan Ms. Office (komputer), Administrasi Perkatoran, Tata Boga, Kewirausahaan, kursus Rias pengantin, dan lain sebagainya. Dalam laman facebook terlihat bahwa kegiatan yang menunjang pendidikan profesional peserta didik PKBM al-Suroya sangat beragam, untuk membekali alumninya supaya siap bekerja dan menjadi wirausahwan sesuai dengan minatnya. Menurut M. Muchlis banyak alumni PKBM al-Suroya yang sangat terbantu dengan program-program yang telah diterima selama pembelajaran. Bahkan diantaranya sudah ada yang lanjut kuliah ke jenjang S1, dan ada juga yang sudah lulus sarjana.

³⁷ Mufidah dkk, *Pakem dan Pembelajaran Kontekstual Inklusif Gender*.

³⁸ Warni Tune Sumar, *Implementasi Kesetaraan Gender dalam Pendidikan*, dalam Jurnal Musawa, Vol. 7 No.1 Juni 2015.

³⁹ Wawancara dengan Kepala PKBM al-Suroya, M. Muchlis, M.Pd tanggal 26 Agustus 2021.

Saat ini PKBM al-Soroya juga membina beberapa Pokjar (kelompok belajar) yang tersebar di kota Metro dan Lampung Timur antara lain: Pokjar 21 Yosodadi, Pokjar 23 Karangrejo, Pokjar 38 Banjarrejo, Batanghari, Pokjar 21 Yosomulyo dan Pokjar Kelurahan Metro. Di samping itu untuk pendidikan kesetaraan, yang banyak diikuti oleh beberapa peserta didik, tercatat ada beberapa pesertanya berasal dari luar negeri yaitu TKI yang belajar diluar negeri dan mengikuti program pendidikan kesetaraan tersebut. Para TKI yang bekerja diluar negeri dan tidak sempat mengenyam pendidikan formal, menjadikan PKBM menjadi solusi untuk mengejar ketertinggalannya pada jenjang formal dengan mengikuti pendidikan kesetaraan, untuk memperoleh ijazah yang setara dalam kejar paket B dan C.

2. PKBM Permata

PKM Permata merupakan kelanjutan dari lembaga pendidikan PUD Permata, yang berdiri tahun 2006. Perubahan dari PAUD menjadi PKBM tersebut dilakukan karena banyaknya kebutuhan pendidikan non formal di kota Metro. PKBM Permata mempunyai peserta didik sekitar 250 siswa, dan tenaga pendidik dan tutor sebanyak 12 orang. PKBM Permata hampir 100% dikelola oleh tenaga pendidik perempuan, dan program yang dilaksanakan pada PKBM ini adalah pendidikan kesetaraan yaitu menyelenggarakan pendidikan jenjang kejar Paket B dan C. Di samping itu juga menyelenggarakan pendidikan PAUD sebagaimana awal lembaga pendidikan ini didirikan.

PKBM Permata berlokasi di jalan Satelit I Iring Mulyo, 15 A Kota Metro, tepat di tengah kota Metro Lampung. Pelaksanaan pembelajaran di masa pandemi dilakukan secara daring, dan memberikan tugas secara luring bagi peserta didik yang tidak mempunyai media pembelajaran online, misalnya untuk pembelajaran PAUD, maka orang tua anak didik PAUD setiap minggu bisa menyetorkan tugas ke PKBM untuk dinilai oleh guru PAU di PKBM tersebut. Biasanya yang mendapat tugas secara luring adalah orang tua siswa PAUD yang tidak mempunyai media belajar online seperti HP android atau Laptop yang memungkinkan mereka bisa mengikuti pembelajaran online.

Hingga saat ini PKBM Permata menyelenggarakan beberapa program pendidikan antara lain: PAUD Kelompok Bermain, Paket B/ Setara SLTP, Paket C/ Setara SLTA, PKM (Pendidikan Kecakapan)/Life Skill, Taman Bacaan Masyarakat, Kursus Komputer, Kursus Sulam Tapis dan lain-lain

Saat ini PKBM Permata Kota Metro telah mempunyai beberapa Pokja (Kelompok Kerja) antara lain Pokja Hatim, Pokja 23 Karangrejo, dan Pokja 29 Banjarsari Kota Metro. Pada awalnya seluruh PKBM di Kota Metro masih menyelenggarakan pendidikan kesetaraan setingkat SD atau Paket A, namun kebijakan pemerintah Kota Metro hanya memberikan izin untuk menyelenggarakan pendidikan kesetaraan pada jenjang Paket B dan C saja, karena kota Metro adalah kota pendidikan dan penduduknya rata-rata atau mayoritas sudah berpendidikan SD. Oleh karenanya maka izin PKBM dalam penyelenggaraan pendidikan kesetaraan atau Paket diharuskan dimulai pada jenjang SMP hingga SMA atau Paket B dan Paket C saja.

Kegiatan PKBM Permata Kota Metro dalam merealisasikan program pendidikan kecakapan atau vokasi dilakukan dalam beberapa kegiatan sejak

berdirinya, antara lain menyelenggarakan dan memberikan keterampilan yang khas untuk produk kerajinan yang berasal dari Lampung, misalnya pada tahun 2020 telah menyelenggarakan pelatihan "Sulam Tapis" untuk peserta didik PKBM dan tutornya. Hal ini dilakukan untuk tetap melestarikan hasil karya tradisional khas budaya Lampung yaitu seni pembuatan kain tapis. PKBM Permata juga membuka beberapa program keahlian (vokasi) lainnya antara lain kursus komputer program desain grafis bagi peserta didiknya. Karena secara fisik PKBM Permata mempunyai fasilitas pendidikan yang memadai misalnya gedung laboratorium komputer dan ruang kelas yang memadai, serta jaringan wifi yang bagus.

3. PKBM Ronaa

PKBM Ronaa adalah lembaga pendidikan noformal yang berada di daerah 16 C Kota Metro, tepatnya berada di Jalan Kurma Ganjar Agung Kota Metro. PKBM Ronaa berdiri tahun 2006, dan sekarang menempati gedung yang cukup megah di daerah itu. Barawal dari penyelenggaraan Pokjar (Kelompok Belajar) dalam rangka membantu masyarakat untuk mendapatkan pendidikan kesetaraan, kemudian berubah menjadi PKBM yang cukup maju di kota Metro. Alamat PKBM ini ada di dua lokasi yaitu di Jalan Yos Sudarso 80 Kecamatan Metro Pusat dan di jalan Kurma 16 C Kota Metro. PKBM Ronaa menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kecakapan hidup (*life skill*), di samping menyelenggarakan pembelajaran kesetaraan berupa Paket belajar B dan C. Tenaga pendidik 20 orang dan jumlah peserta didik sebanyak 450 orang dari berbagai jenjang dan jenisnya. Sejumlah penghargaan telah dimenangkan oleh PKBM ini. Gedung pusat administrasi PKBM ini berada di jalan Yos Sudarso Metro Pusat, Kauman Kota Metro. Sedangkan untuk gedung praktek dan pembelajaran berada di Ganjar Agung Kota Metro.

Selama masa pandemi Corona, PKBM Ronaa tetap melaksanakan pembelajaran secara daring dengan melaksanakan protokol kesehatan secara ketat. Menurut data yang terdapat dalam data.kemdikbud.go.id PKBM Ronaa mempunyai 7 Rombel dan siswa laki-laki sebanyak 316 dan siswa perempuan 112 orang, dan guru tetap 4 orang. Sedangkan kurikulum yang digunakan adalah kurikulum 2013. Penyelenggaraan pendidikan dilakukan selama 6 hari. PKBM Ronaa dipimpin oleh Al-Makruf Kusnan Fitrio Atmaja, Spdi (alumnus STAIN Jurai Siwo Metro/IAIN Metro) dan operator PKBM Fera Meizar, dengan status terakreditasi B.⁴⁰

Sama dengan PKBM lainnya di Kota Metro, PKBM Ronaa termasuk salah satu SPNF (Satuan Pendidikan Non Formal) yang tumbuh dan berkembang pesat. Beberapa kali kompetisi antar SPNF, PKBM ini memperoleh beragam penghargaan. Meskipun awalnya PKBM Ronaa hanya menyelenggarakan pendidikan kesetaraan (Kelompok Belajar/ Kejar Paket), namun kini lembaga pendidikan non formal ini juga menyelenggarakan pendidikan vokasi atau keahlian praktis bagi peserta didiknya, dan tetap mempertahankan program kesetaraan sebagai basis utama PKBM Ronaa. Pembelajaran vokasi dipilih berdasarkan kebutuhan kerja yang praktis dan banyak dibutuhkan masyarakat

⁴⁰ Sekolah. Data.kemdikbud.go.id.

era sekarang. Dalam deskripsi kegiatan pembelajaran vokasi di PKBM Ronaa bertujuan memberikan keterampilan praktis bagi siswa yang belajar di lembaga pendidikan tersebut.⁴¹

Hingga saat ini PKBM Ronaa tetap menyelenggarakan pendidikan kesetaraan atau kejar Paket B Dan C, dan meningkatkannya dengan memberikan keterampilan vokasional bagi peserta didiknya secara gratis sebagai bagian dari program beasiswa, dengan harapan setelah lulus nantinya menjadi alumni yang siap bekerja di masyarakat. Pilihan pendidikan vokasi yang ditawarkan juga beragam jenisnya, misalnya memberikan keterampilan desain grafis, kursu seni Kriya akrilik dan Resin dan sebagainya.⁴²

Kiprah PKBM Ronaa sangat progresif, di samping mempunyai web tersendiri, juga santer mempromosikan kegiatan pembelajaran sekaligus sebagai ajang promosi melalui media sosial facebook, twitter, instagram, blog, dan lain-lain. Dalam laman facebook PKBM Ronaa memperlihatkan padatnya kegiatan di lembaga pendidikan non formal tersebut, tanggal 27 Agustus 2021 kedatangan tamu PKBM Insan Cendekia di PKBM Ronaa untuk menimba ilmu Seni Kriya Akrilik. Menurut kepala PKBM Ronaa sebenarnya banyak PKBM, khususnya di kota Metro dulunya pernah belajar di PKBM Roona dan sekarang mereka juga berjuang dilembaga pendidikan non formal dan mendirikan beberapa PKBM di wilayahnya masing-masing. Kebanyakan mereka adalah alumni dari STAIN atau IAIN Metro.⁴³

Jenis program yang dijalaknan oleh PKBM Ronaa pada awalnya berupa program-program pembelajaran antara lain; Pendidikan Kesetaraan Paket B, Pendidikan Kesetaraan Paket C, Taman Bacaan Masyarakat (TBM), Pendidikan Pemberdayaan Perempuan, Kelompok Bermain./ Play Goup dan Magang ke Jepang.

Disamping menyelenggarakan pendidikan kesetaraan, PKBM Ronaa juga memberikan sejumlah keterampilan praktis berupa kegiatan kursus atau pendidikan vokasi dengan tujuan penguatan teknis aplikatif: Kursus Komputer, Kursus Menjahit, Tata Kecantikan Rambut, Bahasa Jepang, Aplikasi Perkantoran, Desain grafis, Moviemakers, animasi, instalasi, Edu Consult, Komunitas, Taman Pendidikan Quran (TPQ) Ronaa, Taman Bacaan Masyarakat (TBM) Ronaa, Program Kemitraan Pendidikan bahasa Asing Jepang Korea⁴⁴

Salah satu program utama PKBM Roona adalah pemberdayaan perempuan, hal ini menunjukkan bahwa masalah gender benar-benar mendapatkan perhatian yang penting dalam program pembelajaran di PKBM tersebut, di samping program-program lainnya yang mendukung kemajuan lembaga dan nilai lebih dari PKBM tersebut dalam menyelenggarakan pendidikan yang responsif gender. Berdasarkan jenis-jenis program yang ditawarkan oleh tiga PKBM yang menjadi objek penelitian ini semua mempunyai

⁴¹ Pkbmronaa.sch.id/2021

⁴² Pkbmronaa.sch.id/2021

⁴³ Wawancara dengan kepala PKBM Ronaa, al-Makruf tanggal 23 Agustus 2021.

⁴⁴ Pkbmronaa.blogspot.com.

program-program yang sangat beragam. Hal ini menunjukkan pada bervariasinya minat peserta didik untuk memilih sesuai dengan minat dan bakat mereka. Di samping itu dalam perspektif program yang ditawarkan menunjukkan bahwa PKBM yang selama ini hanya terkenal sebagai lembaga untuk mendapatkan ijazah setara dengan lembaga-lembaga pendidikan formal setingkat SD, SMP dan SMA bagi masyarakat atau anak putus sekolah, ternyata di dalamnya juga diberikan keterampilan yang bermanfaat bagi masa depan mereka berupa keahlian atau keterampilan praktis yang dapat membantu dalam persaingan kerja, sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Pada awalnya PKBM sebagai lembaga pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan non formal (PNF) bersifat terbuka untuk semua lapisan masyarakat, karena fungsinya memberikan solusi bagi mereka yang belum menyelesaikan pendidikan formal, karena kendala tertentu. Namun sekarang keberadaannya mengalami transformasi yang begitu cepat menjelma menjadi lembaga pendidikan nonformal yang menyelenggarakan berbagai program-program pembelajaran sesuai dengan kebutuhan sosial, dan menjelma menjadi lembaga pendidikan yang menyelenggarakan kegiatan kejuruan dan keahlian atau vokasi, disamping tentunya tetap mempertahankan misinya sebagai lembaga pendidikan kesetaraan.

Keberadaan ketiga PKBM tersebut, diakui atau tidak, mempunyai peran menjadi solusi sekaligus pendidikan alternatif yang sangat berperan dalam peningkatan kualitas pendidikan masyarakat. Sejak kemunculannya PKBM telah menunjukkan kiprahnya dengan melaksanakan pendidikan yang mengakomodasi terhadap masyarakat yang membutuhkan pendidikan non formal dari berbagai kelas sosial, dan berbagai jenis gender yang ada, tanpa ada diskriminasi, sifat pembelajarannya inklusif termasuk dalam memandang perbedaan gender yang ada. Sebagai salah satu komponen dalam subsistem pendidikan nasional PKBM mempunyai tugas yang cukup berat dalam pemerataan pendidikan bagi semua anak bangsa.

Penciptaan iklim pembelajaran yang inklusif gender salah satunya yang harus diperhatikan hal ini sesuai semangat pengarusutamaan gender dalam pendidikan termasuk dalam jalur PNF (Pendidikan Non Formal). Pengarusutamaan gender (PUG) dalam pendidikan sudah lama didesain dan menjadi kebijakan pemerintah mulai dari Kemendiknas dan Kemenag RI. Alasan pentingnya pengarusutamaan gender (*Gender Mainstreaming*) dalam pendidikan antara lain. *Pertama*, pengarusutamaan gender dalam pendidikan yang bertujuan atas terselenggaranya perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan dan program dalam pendidikan nasional, merupakan salah satu proses untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender dalam kehidupan keluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di bidang pendidikan. *Kedua*, penerapan strategi PUG pada bidang pendidikan akan meminimalisir kesenjangan gender dalam pendidikan. Bagi Indonesia, pelaksanaan komitmen internasional seperti pendidikan untuk semua (*Education for All*), Konvensi Hak Anak, Tujuan Pembangunan Millenium (*Millenium Development Goals/MDGs*), serta kesepakatan dunia untuk pembangunan berkelanjutan (*World Summit on Sustainable Development*) yang secara tegas menyatakan pentingnya pendidikan sebagai salah satu cara untuk

meningkatkan keadilan dan kesetaraan gender, serta terwujudnya keadilan sosial dalam masyarakat menjadi satu yang sangat krusial.⁴⁵

Dalam pengamatan dan hasil wawancara terhadap pengelola PKBM yang menjadi objek penelitian ini mengindikasikan, bahwa secara faktual ketiga PKBM tersebut telah melaksanakan pendidikan berbasis gender dengan baik. Berdasarkan wawancara dengan kepala atau direktur PKBM antara lain dengan kepala PKBM Roona, PKBM al-Suroya dan PKBM Permata, pada prinsipnya mereka sadar akan pentingnya menciptakan pembelajaran yang mengedepankan penerapan pembelajaran yang responsif gender. Hal ini bisa dilihat dari isi kurikulum yang ditentukan oleh Kementerian Pendidikan Nasional melalui Direktorat PNF sangat menekankan arti penting gender dalam konten kurikulum pendidikan non formal. Begitu juga dalam pelaksanaan proses pembelajaran, hingga evaluasi pembelajaran semua dilaksanakan dengan dasar-dasar pendidikan inklusi atau sensitif gender, yang mensetarakan antara peserta didik laki-laki maupun perempuan untuk mendapatkan pelayanan pendidikan yang sama.⁴⁶

Dalam perspektif tenaga pendidikan atau tenaga pengajar sebagian besar tutor atau pengajar dari tiga PKBM tersebut secara gender telah melibatkan tenaga pendidik perempuan dan laki-laki, khususnya di PKBM Permata. Berdasarkan wawancara dengan kepala PKBM menyatakan bahwa 90% pengajarnya perempuan, namun tenaga pendidik laki-laki juga dilibatkan dalam proses belajar dan mengajar. Hal ini bisa dimengerti karena sebelumnya PKBM ini merupakan lembaga pendidikan PAUD Permata, di mana yang menjadi pendidiknya adalah para Sarjana alumni prodi PAUD. Akan tetapi setelah menjadi PKBM, pelaksanaan pembelajaran dilaksanakan secara inklusif karena lembaga pendidikan non formal tersebut juga melebarkan sayap dengan menyelenggarakan pendidikan kesetaraan melalui kejar paket A, B dan C, yang tidak hanya menyelenggarakan pendidikan PAUD saja. Semua pendidik di PKBM ini adalah Sarjana S1 yang beragam latar belakangnya, kebanyakan berasal dari Fakultas Tarbiyah dan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP). Dengan demikian PKBM Permata merupakan transformasi dari PAUD Permata menjadi PKBM. Fenomena ini juga dialami beberapa PKBM di kota Metro yang berkembang dari TPA (Taman Pendidikan Al-Qur'an) kemudian menjadi PKBM, dari Taman Bacaan Masyarakat kemudian berkembang pesat dan berubah menjadi PKBM.

Sedangkan untuk PKBM al-Suroya, dan PKBM Rona, dalam perspektif tenaga pendidiknya, jumlahnya berimbang antara pegajar perempuan dan laki-laki. Dalam konteks jumlah peserta didiknya tergantung dari program yang ditawarkannya, misalnya untuk program vokasi terlihat perbedaannya, misalnya untuk program tata boga atau rias penganten tutornya perempuan dan pesertanya juga perempuan, tetapi program ini juga secara inklusif memberikan kesempatan pada peserta didik laki-laki, jika berminat untuk belajar tata rias

⁴⁵ Tim Gender dan Inklusi Sosial, *Kebijakan dan Anggaran Pendidikan Dasar Yang Responsif Gender*, (Indonesia Australia Partnership in Basic Education, 2007), h. 39-40.

⁴⁶ Wawancara dengan kepala PKBM Roona, PKBM al-Suroya dan PKBM Permata Kota Metro, tanggal 3 Oktober 2021.

tersebut. Dilihat dari segi pendidikan para tenaga pengajar atau tutor dari PKBM Roona dan PKBM al-Suroya mayoritas berasal dari Sarjana Fakultas Tarbiyah, bukan hanya alumni S1, bahkan sebagian di antaranya sudah menamatkan jenjang pendidikan S2.

Berdasarkan wawancara dengan kepala PKBM baik al-Suroya, PKBM Roona, dan PKBM Permata mengindikasikan bahwa pada dasarnya mereka mengerti tentang konsep kesetaraan gender dan secara aplikatif diterapkan dalam setiap model pembelajarannya. Begitu juga para gurunya atau tutor yang bekerja di ketiga PKBM tersebut. Pada umumnya tenaga pendidik atau tutor PKBM di kota Metro semuanya merupakan sarjana berpendidikan S1. Bahkan sebagian diantaranya adalah alumnus program Magister dari beberapa perguruan tinggi ternama di Lampung, antara lain Alumni UIN Raden Intan Lampung, UNILA (Universitas Negeri Lampung) dan IAIN Metro Lampung. Artinya dari konteks perundangan mereka sudah memenuhi kualifikasi sebagai guru, yang berprofesi di bidang pendidikan non-Formal, dan terhadap masalah sensitifitas pendidikan mereka benar-benar memahami dan menerapkannya dalam PKBM. Dengan demikian secara filosofis dalam mainstream pemikiran para pengelola PKBM tersebut telah terbentuk pentingnya pendidikan yang responsif gender.

Kalau dilihat dalam perspektif prinsip-prinsip pembelajaran inklusif gender, sebenarnya tiga PKBM (Roona, Al-Suroya, dan Permata), semua sudah memenuhi beberapa prinsip-prinsip pembelajaran tersebut. Menurut prinsip pengembangan pembelajaran inklusif gender bahwa pembelajaran yang inklusif gender itu paling tidak harus memenuhi prinsip-prinsip pengembangan gender. *Pertama*, Kesamaan akses/ kesempatan bagi laki-laki dan perempuan. *Kedua*, kesamaan partisipasi/ Peran serta laki-laki dan perempuan. *Ketiga*, persamaan kontrol/tanggungjawab laki-laki dan perempuan. *Keempat*, kesamaan manfaat terhadap hasil pendidikan untuk laki-laki dan perempuan.⁴⁷

Prinsip-prinsip pengembangan pembelajaran inklusif gender, menurut para guru dan kepala PKBM yang menjadi tempat penelitian menyebutkan bahwa prinsip-prinsip itu telah diterapkan ke empat-empatnya dalam proses pembelajaran di PKBM Roona, PKBM al-Suroya dan PKBM Permata. Dalam menjalankan program-program pembelajaran di kota Metro, semua PKBM selalu dalam pengawasan Pemkot terutama dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro, khususnya dalam menjaga kualitas pembelajarannya, juga penerapan pendidikan yang inklusif gender. Berdasarkan wawancara dengan M. Mukhlis, (Kepala PKBM al-Suroya, AK.Fitrio Atmaja, (Kepala PKBM Roona), dan Marni, (Kepala PKBM Permata), menyatakan bahwa prinsip-prinsip pembelajaran berbasis gender telah diterapkan sejak PKBM didirikan hingga sekarang tidak ada diskriminasi antara laki-laki dan perempuan, baik dalam memberikan kesempatan atau akses pendidikan, partisipasi, kontrol, dan kemanfaatan semua program-program pembelajaran dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip pembelajaran yang responsif gender.⁴⁸

Menurut para tutor, keberadaan PKBM di Kota Metro kebanyakan merupakan inisiatif dari kelompok masyarakat yang terdidik, dan sekaligus

⁴⁷ CTL-PAKEM Inklusif Gender 1, tt, h. 7.

⁴⁸ Wawancara tanggal 3 Oktober 2021.

memberikan peluang kepada para sarjana untuk mengamalkan ilmunya sekaligus memberikan lapangan pekerjaan baru. Semangat gender di antara mereka juga terlihat dari pada program-program pendidikan yang seimbang dalam memberikan peluang dan kesempatan antara laki-laki dan perempuan. Tenaga pendidik di lembaga pendidikan nonformal PKBM merasa terhormat dengan profesinya sebagai pendidik, untuk mengamalkan ilmu pendidikan yang telah diperoleh dari berbagai lembaga pendidikan tinggi yang menjadi almamternya, sekaligus memperoleh pengalaman baru sebagai tenaga pendidik atau tutor di PKBM.⁴⁹ Berdasarkan penjelasan dari pengelola ataupun tenaga pendidik di PKBM tersebut menunjukkan bahwa masalah gender dalam konteks pembelajaran telah dilakukan dengan berimbang baik dari aspek proses pembelajarannya, pembagian kerja dalam pengelolaannya maupun dalam perspektif evaluasi dan kesempatan untuk mengakses pendidikan di lembaga nonformal.

Permasalahan pendidikan yang responsif gender masih cukup besar, terutama di negara-negara berkembang termasuk di Indonesia. Apalagi menurut sensus penduduk terakhir tahun 2020, mengindikasikan bahwa jumlah Populasi perempuan di Indonesia sangat tinggi dibandingkan dengan jumlah populasi laki-laki, termasuk di Propinsi Lampung. Meskipun kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan bersifat netral gender, namun pada kenyataannya perbedaan gender masih menjadi permasalahan dalam memperoleh pendidikan yang bermutu.⁵⁰

Usaha untuk mengurangi atau menghapus kesenjangan gender tidak hanya berasal dari pusat, akan tetapi juga diupayakan oleh pemerintah daerah dengan jalan membuka dan memperluas kesempatan di bidang pendidikan dalam rangka meningkatkan kualitas SDM baik guru maupun siswa. Termasuk meningkatkan dan menambah fasilitas pendidikan yang lengkap, memberikan akses pendidikan seluasnya bagi masyarakat Indonesia, termasuk propinsi Lampung. Di samping itu pemerintah memberikan kesempatan untuk lembaga-lembaga pendidikan yang dikelola oleh swasta, baik lembaga pendidikan formal maupun lembaga pendidikan non formal.

Pendidikan non formal yang diselenggarakan PKBM mayoritas dikelola oleh swadaya masyarakat, maka dibutuhkan kreatifitas dan kecerdasan yang luar biasa dari pengelolanya untuk meningkatkan kualitas pembelajarannya, dan hal ini membutuhkan sokongan dana yang tidak sedikit, untuk membangun fasilitas pendidikan yang berkualitas, dan ini menjadi masalah yang cukup pelik bagi penyelenggara pendidikan non formal. Hal ini sangat berguna untuk mempertahankan keberadaan lembaga pendidikan non formal tersebut di tengah persaingan pendidikan dan lapangan kerja yang responsif gender.

F. Kesimpulan

⁴⁹ Wawancara dengan guru atau tutor PKBM al-Suroya, Roona dan Permata.

⁵⁰ Profil Gender Provinsi Lampung 2019

Berdasarkan paparan dalam beberapa bab dalam penelitian ini, maka dapat diambil beberapa kesimpulan utama penelitian sesuai dengan rumusan masalah atau pertanyaan penelitian.

Pertama, Praktek kesetaraan gender dalam PKBM dilaksanakan dalam semua proses pembelajaran yang responsif gender, mulai dari perencanaan, pelaksanaan pembelajaran, dan evaluasi pembelajaran dengan memperhatikan prinsip-prinsip pembelajaran responsif gender antara lain *Pertama*, Kesamaan akses/ kesempatan bagi laki-laki dan perempuan. *Kedua*, kesamaan partisipasi/ Peran serta laki-laki dan perempuan. *Ketiga*, persamaan kontrol/ tanggungjawab laki-laki dan perempuan. *Keempat*, kesamaan manfaat terhadap hasil pendidikan untuk laki-laki dan perempuan. Hal ini sesuai dengan misi PUG (Pengarutamaan Gender atau Gender Mainstreaming dalam bidang pendidikan, yang telah dicanangkan pada era reformasi oleh Kementerian Pendidikan Nasional.

Kedua, PKBM dalam melaksanakan tugas pendidikan merupakan lembaga atau satuan pendidikan nonformal yang keberadaannya diatur oleh Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 81 tahun 2013. Dalam melaksanakan program-program pembelajaran, PKBM mengikuti pola pembelajaran yang responsif gender, karena berpedoman pada prinsip-prinsip pembelajaran berbasis gender sebagaimana semangat PUG (Pengarutamaan Gender) melalui Inpres No 9 tahun 2000 dan diperkuat oleh Permendikbud No. 84 tahun 2008. Meskipun demikian dalam pelaksanaan pendidikan mainstreaming gender, PKBM juga mempunyai beberapa hambatan antara lain masalah pandangan yang tidak adil dari masyarakat tentang lulusan PKBM yang masih dipandang sebelah mata, jika dibandingkan dengan lulusan lembaga pendidikan formal. Padahal secara yuridis formal keberadaan satuan pendidikan nonformal diakui oleh negara setara dengan lembaga formal, terutama dalam UU No-20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Kendala lainnya yang dialami PKBM adalah masalah anggaran karena secara realitas, semua PKBM yang ada diinisiasi oleh masyarakat atau swasta. Untuk mengatasinya sangat ditentukan oleh kecerdasan pengelolanya dan promosi yang masif supaya PKBM tetap eksis dalam menjalankan tugas dan fungsinya melayani dan memberdayakan masyarakat. Kejelian dan kemampuan untuk kerjasama dengan lembaga-lembaga lainnya sangat dibutuhkan, apalagi pada masa sulit ketika terjadi pandemi covid-19.

Daftar Pustaka

- Abidin, Zainal, *Kesetaraan Gender dan Emansipasi Perempuan dalam Pendidikan Islam*, dalam Tarbawiyah: Jurnal Ilmiah Pendidikan Islam, 2017.
- Ahmadi, *Ideologi Pendidikan Islam, Paradigma Humanisme Teosentris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010)
- Alifia Putri Yudianti, *Sejarah Feminisme Barat, Perjuangan untuk Keadilan Gender*, dalam kumparan.com.
- Ais-Irmawati, *Peran Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Dalam Mengurangi Buta Aksara di Kabupaten Karimun*, dalam Jurnal Pendidikan & Kebudayaan, 10 Agustus 2017.

- Burhan Bungin (ed), *Metodologi Penelitian Kualitatif; Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Comunity Learning Centre (CLC), UNESCO, 1998.
- CTL -*Pakem dan Pembelajaran Kontekstual Inklusif Gender*.
- Deny Firmansyah Sutisna, dkk, *Peranan PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat dalam Menumbuhkan Minat Baca Warga Belajar*, dalam *Student e-Journals*, <http://journal.unpad.ac.id>. 2012.
- Dewi Ratnawati dkk, *Kesetaraan Gender Tentang Pendidikan Laki-Laki dan Perempuan*, dalam *Jurnal Harkat : Media Komunikasi Gender*, 15 (1), 2019.
- Elaine Neufeldt, *Webster's New World Dictionary*, (New York: Webster's New World Cleveland, 1984),
- Flavia M Yunazar, *Studen.s Column, Perjalanan Feminisme di Indonesia dan Tokohnya*, Binus University, communication. Binus. ac. Id.
- Hardjono dkk, *Model Pemberdayaan Pusat Kegiatan belajar Masyarakat dalam Pengelolaan Program Pendidikan Kesetaraan berbasis Lifeskill dan Kewirausahaan*, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang, dalam *Journal.unnes.ac.id*.
- Hillary M Lips, *Sex and Gender: A Introduction*, London, 1993.
- <http://pkbmmnc.blog.com>. *Sejarah Berdirinya PKBM Di Indonesia*, dalam *PKBM Manunggal Nusantara Cyberschool, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, Kejar Paket ABC, homeschooling, dan kursus lifeskill*, Juli 2020.
- Inpres No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan.
- John Echols dan Hasan Shadili, *Kamus Inggris Indonesia* Gramedia: Jakarta, 1984.
- Lexy J. Meoloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Rosda Karya, 2002
- Imam Syafei dkk, *Konsep Gender Dalam Perspektif Pendidikan Islam*, dalam *Al-Tazkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 11, No. 2 (2020)
- Margaret L Andersen, *Thinking About Women Sociological Perspectives on Sex And Gender* New York: Macmillan Publishing Company, 1988.
- Marzuki, *Kajian Awal tentang Teori-Teori Gender*, dalam *Jurnal Civics*, Vol 4 No. 2 2007, UNY
- Media Indonesia, *Kesetaraan Gender di Indonesia Masih Rendah*, MI, 08 Oktober 2020.
- Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indah, 1991.
- Mita Septiani, *Pengalaman Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dalam Memfasilitasi Masyarakat Belajar Sepanjang Hayat*, dalam *Jurnal Ilmiah Visi PPTK PAUDNI* Vol. 10 No. 2 Desember 2016.
- Mufidah, *Bingkai Sosial Gender, Islam Strukturasi dan Konstruksi Sosial*, Malang: UIN-Maliki Press, 2010.
- NEW Indonesia, *Soal Keadilan Gender dalam Pendidikan, Indonesia Peringkat Utama di Asia*, 16 Oktober 2016.
- Nina Sardjuani, "Kesetaraan Gender dalam Pendidikan di Indonesia", dalam *ACDP Indonesia, Education Sector Analytical and Capacity Development Patnership*, September 2013.
- Permendikbud Nomor 81 tahun 2013, tentang *Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal*.

- Permendiknas No. 84 Tahun 2008, *tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pendidikan*.
- Petrik Matanasi dalam Majalah Tirto. Id. "Mengenang Lahirnya Program Wajib Belajar", edisi 02 Mei 2019.
- Ratna Megawangi, *Membiarkan Berbeda: Sudut Pandang Baru Mengenai Relasi Gender*, Bandung: Mizan : 1999
- Reber , M.F. *An Alternative Frameork for Comunity Learning Centres in The 21st Century: A System Design Aproach toward The Creation of a Transformational Learning System*, Dissertation .com. boopump.com.
- Sarah Simson, *A Brief History of 21 st Century Community Learning Centers, Afterschool Snack*, dalam [www. Afterschoolingliance.org](http://www.Afterschoolingliance.org).
- Syahrul Amar, *Perjuangan Gender Dalam Dalam Kajian Sejarah Wanita Indonesia Abad XIX*, *Jurnal Fajar Hitoria*, Vol 1, Edisi 2, 2017.
- Sihombing, *Pendidikan Luar Sekolah Kini dan Masa Depan* (1999).
- Sri Hidayati Djoeffan, *Gerakan Feminisme di Indonesia di Indonesia Tantangan dan Strategi Mendatang*, dalam *Jurnal Mimbar*, No. 3 tahun XVII Juli-September 2001.
- Tim Gender dan Inklusi Sosial, *Kebijakan dan Anggaran Pendidikan Dasar Yang Responsif Gender*, Indonesia Australia Patnership in Basic Education, 2007.
- UU No. 20 tahun 2003 *tentang Sistem Pendidikan Nasional*, 2003.
- [www. kejarpaket. Web.id](http://www.kejarpaket.Web.id). *Kejar Paket A, B, C untuk Siapa? PKBM Memberi Solusi*. 2021.
- Warni Tune Sumar, *Implementasi Kesetaraan Gender dalam Pendidikan*, dalam *Jurnal Musawa*, Vol. 7 No.1 Juni 2015.